



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT AHLI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT AHLI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penasihat Ahli Kapolri bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri sesuai dengan penugasan Kapolri dan bukan merupakan bidang tugas dan wewenang unsur-unsur organisasi Polri.
- (2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan denganantisipasi perkembangan lingkungan aktual yang berdampak strategis pada pelaksanaan tugas Polri.
- (3) Saran dan pertimbangan Penasihat Ahli Kapolri disampaikan kepada Kapolri secara lisan, tertulis dan/atau melalui sarana teknologi informasi.
- (4) Saran dan pertimbangan yang disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuat secara perorangan maupun kelompok.
- (5) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa naskah yang bersifat umum atau saran terbatas.
- (6) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (7) Dalam hal saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan kepada masyarakat, penasihat ahli Kapolri wajib mendapatkan izin dari Kapolri.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penasihat Ahli Kapolri diberhentikan apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir.
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang sah;
 - f. menjadi pengurus pada organisasi partai politik;
 - g. melakukan perbuatan atau ucapan yang dapat merugikan organisasi Polri; dan/atau
 - h. menyebarkan saran dan pertimbangan tanpa izin Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) yang dibuat secara perorangan maupun kelompok, tanpa seizin Kapolri.
- (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan lain Kapolri dapat memberhentikan Penasihat Kapolri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada Kapolri melalui Koorsahli Kapolri.
- (4) Pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 693